



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AYI ROHANAH**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **879544**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.133.109.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m2/100 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 178.780.000
2. Tanah Seluas 1425 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 51.300.000
3. Tanah Seluas 1122 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 179.510.000
4. Tanah Seluas 623 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000
5. Tanah Seluas 824 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 11.536.000
6. Tanah Seluas 4010 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 56.140.000
7. Tanah Seluas 3989 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.846.000
8. Tanah Seluas 2943 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 58.860.000
9. Tanah Seluas 1896 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 121.344.000
10. Tanah Seluas 2093 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 133.952.000
11. Tanah Seluas 4625 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 23.125.000
12. Tanah Seluas 5292 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL



SENDIRI Rp. 254.016.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 28.000.000

1. MOBIL, NISSAN TERANO GRAND ROAD Tahun 1997, HASIL

SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.296.585

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.188.405.585

III. HUTANG

Rp. 100.398.019

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.088.007.566

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.